

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti. 1992
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Ghalia. Bogor. 2004
- _____. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta. 2010
- Aminuddin Salle. Abrar Saleng. A. Suryaman Mustari Pide. *et.al. Bahan Ajar: Hukum Agraria*. AS Publishing. Makassar. 2010
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2005
- Andrian Sutedi. *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Arba. H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta. 1997
- Cst Kansil. Christine. S.T Kansil. *et. al. Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989
- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita. *Aspek Hukum Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. BA: Offset. Yogyakarta. 200
- Irwan Soedrojo. *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*. Arloka. Yogyakarta. 2003
- _____. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi. Pengaturan dan Praktik*. LaksBang Mediatama. Yogyakarta. 2014
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. 2015

- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta. 2010
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Buku Kompas. Jakarta. 2008
- _____. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas. Jakarta. 2001
- Muchsin dkk. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Refika Aditama. Bandung. 2007
- Muchtar Wahid. *Mamknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Republika. Jakarta. 2008
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2009
- _____. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2019
- Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum. *Pedoman Penulisan Tesis*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2018
- Titik Tri Wulan dan Sinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2010
- Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2013
- Yamin Lubis, Abd. Rahum Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Cetakan Kedua. Mandar Maju. Bandung. 2010

Jurnal:

- Ahmad Habibi Maftukhan. Anjar Setiawan. Muhamad Abdul Aziz. *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Verstek Volume 2 Nomor 2. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2014

- Anggiat Perdamean Parsaulian, Sudjito. *Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)*. Jurnal Bhumi. Volume 5 Nomor 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Mei-2019
- Ayu Sulviani Mega Saputri. Hartono Widodo. Verawati Br. Tompul. *Tinjauan Yuridis Terhadap pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum*. Jurnal Krismna Law. Volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Bekasi-Jawa Barat. 2021
- Darwis Anatami. *Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat ganda Atas Sebidang Tanah*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Samudra Keadilan. Kota Langsa Aceh. Juni-2017
- Fachri Mihammad Rizki, Listyowati Sumanto. *Kepemilikan Sebagian Tanah Yang Tumpang Tindih Antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri Di Kota Cilegon*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah. Volume 6 Nomor 2. Lembaga Penelitian Universitas Trisakti. Jakarta. Juli-2021
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea. *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali*. Jurnal Negara Hukum. Volume 2 Nomor 2. Bidang Penelitian Pusat Penelitian: Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. 2011
- Herawan Sauni, *Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan*, Jurnal UBELAJ, Volume 1 Nomor 1, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Oktober-2016
- Indah Sari. *Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraris (UUPA)*. Jurnal Mitra Manajemen. Volume 9 Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Jakarta. 2017
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 11 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Jakarta. September-2020
- Isis Ikhwanasyah. Djumardin. *Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jurnal Jatiswara. Volume 33 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. Maret-2018
- Klaudius Ilkam Hulu. *Kekuatan Alta Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan*. Jurnal Panah Keadilan. Volume 1 Nomor 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan. Februari-Juli, 2021

- Maharani Nurdin. *Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum. Volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Desember-2018
- Meyflin R.K. Damopoli. *Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota Manado*. Jurnal Politico. Volume 9 Nomor 2. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2020
- Muhammad Yusrizal. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal De Lega Lata. Volume 2 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Januari-Juni 2017
- Rommy Haryono Djojarahardjo. *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 1. Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya. Surabaya. Mei-2019
- Safi. *Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governence di Indonesia*. Jurnal Pamator. Volume 3 Nomor 2. Universitas Trunojoyo. Madura. 2016
- Siti Romlah. *Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP. Volume 5 Nomor 1. Universitas Riau, Riau, April-2018
- Urip Santoso, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Januari-2013
- Winahyu Erwiningsih. *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta. 2006

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Website:

Hukum Online.com. *Syarat Meningkatkan Hak Pakai Menjadi Hak Milik*. diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-meningkatkan-hak-pakai-menjadi-hak-milik-lt530d4405a3ea4>. Pada Tanggal 16 Mei 2020, pukul 22:05 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/pasti>. Pada Tanggal 04 Oktober 2020. Pukul 19:20 WITA

Repository Unhas. Analisis Penyelesaian Konflik Pengelolaan Aset Tanah Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. Diakses melalui: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1169/2/E012181001_tesis_%20%201-2.pdf. Pada Tanggal 27 Oktober 2021. Pukul 16:02 WITA

Universitas Indonesia Library. *UI-Tesis*. Diakses melalui: <https://library.ui.ac.id/detail?id=107620&lokasi=lokal>. Pada Tanggal 27 Oktober 2021. Pukul 15:20 WITA

Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Takalar*, diakses dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Takalar, pada Tanggal 09 April 2022, pukul 13:20 WITA

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 30 Maret 2022

Nomor : 158/IP-DPMPTSPKTRANS/III/2022
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Kepala BPKD Kab. Takalar
 2. Kepala BPN Wilayah Kab. Takalar
 3. Lurah Panrannuangku
 Di-
Takalar

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNHAS Makassar Nomor: 2755/UN4.5.1/PT.01.04/2022 tanggal 23 Maret 2022, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/158/KKBP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : ZHULIQRANY
 Tempat Tanggal Lahir : Jenepono, 14 April 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2) UNHAS Makassar
 Alamat : BTN Beringin Permai F/2 Kel/ Desa Borong
 Kec. Mangala Kota Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Tesis* dengan judul :

**“KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH KANTOR
 KELURAHAN PANRANNUANGKU “**

Yang akan dilaksanakan : 30 Maret s/d 30 Mei 2022
 Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Tesis* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dipatuhi dan seperlunya.



RUSDI K. Sals., M. Si
 Pembina Tk. I
 NIP : 19731220 200003 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi PPs UNHAS Makassar di Makassar;
5. Pertinggal;